

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Serikat Buruh Dalam Pemenangan Obon Tabroni**

Pada hakikatnya serikat pekerja merupakan perkumpulan daerah yang mempunyai kekuatan politik luar biasa dengan melibatkan mayoritas dan persetujuan dalam permintaan sosial. Kelompok ini merupakan kelompok orang-orang yang peduli terhadap kesejahteraan anggotanya dan keluarganya. Tentu saja, pekerja tidak bisa hanya berjuang di tingkat mikro untuk mencapai tujuannya. Untuk mempengaruhi kebijakan publik yang dapat menguntungkan pekerja, pekerja harus berjuang di tingkat yang lebih tinggi, khususnya di bidang politik.

Pihak yang memiliki kepentingan (*vested party*) adalah perkumpulan mendasar atau lembaga politik yang melengkapi kemampuan untuk menangani permintaan yang memiliki kepentingan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Almond dan Powell, *vested party* adalah kumpulan orang-orang yang terkait dengan ikatan kepentingan atau keuntungan yang sadar akan adanya kepentingan tersebut.<sup>63</sup>

Berdasarkan pemikiran inilah keterkaitan antara persoalan pekerjaan dan pemerintahan ternyata mempunyai kaitan erat. karena ketergantungan buruh terhadap politik harus diakui oleh setiap gerakan serikat buruh. Kesadaran berpolitik dan partisipasi buruh dalam aktivitas politik diperlukan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Gerakan politik ini dilakukan oleh para buruh yang tergabung dalam asosiasi FSPMI dengan menunjuk salah satu oknumnya, yakni Obon Tabroni, sebagai calon otonom pada Pilkada Provinsi tahun 2017 di Pemerintahan Bekasi.

Obon Tabroni, yang berbicara kepada para spesialis, mencalonkan diri sebagai kemungkinan untuk menggunakan kursus gratis secara resmi. Saat Obon dinyatakan kalah telak dengan perolehan 207.940 suara dari 1.183.788 suara pada pemilu teritorial terakhir. Dari hasil pemeriksaan pencipta, ada beberapa alasan mengapa suara ahli tidak bisa memenangkan Obon Tabroni.



---

<sup>63</sup> G.A Almond dan R. Powell, *Comparatives Politics, Second Edision*, USA Canada: Little Brown and Company, hal, 34.

### 5.1.1 Minimnya Solidaritas Antar Serikat Buruh

Absennya kekompakan antar serikat dagang di Pemerintahan Bekasi menjadi pembedaan mendasar atas kekalahan Obon Tabroni dan komplotannya dalam perebutan wilayah Rezim Bekasi tahun 2017. Obon Tabroni yang mencalonkan diri melalui kursus gratis ini tentu sangat mengharapkan dukungan dari suara buruh, khususnya di Pemerintahan Bekasi sendiri. Bagaimanapun, pembagian suara buruh berakibat fatal bagi permohonan Obon Tabroni.

Berdasarkan temuan wawancara penulis dengan sejumlah narasumber, antara lain Obon Tabroni dan Rumainur, ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya suara buruh. Pertama-tama, ada pergulatan antar pionir politik. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan penilaian dan pemikiran antar organisasi pekerja, khususnya di kalangan pionir serikat pekerja itu sendiri.

Seperti yang diungkapkan Myron Weiner, para pionir politik yang berebut kekuasaan seringkali mencari bantuan massa. Untuk situasi ini, investasi sering terjadi dan dikumpulkan.<sup>64</sup> Dampak dari perbedaan filosofis ini muncul dalam perpecahan kritis dalam pemungutan suara di Obon saat pemungutan suara. Akademisi rekan Obon, Rumainur menjelaskan, suara buruh tidak mampu memenangkan Obon dan rekannya karena perbedaan ideologi tersebut.

*“Bukan tidak mungkin Obon dan rekannya bisa menang jika suara buruh bersatu pada Pilkada 2017.” Karena hakikatnya suara buruh di daerah Bekasi bisa dibilang 30% dari total penduduk yang mempunyai hak pilih pada pengambilan keputusan di tingkat provinsi tahun 2017, sehingga sangat tinggi dan dianggap layak untuk memenangkan pasangan Obon. Namun secara umum, pada perlombaan teritorial tahun 2017, beberapa asosiasi memutuskan untuk tidak memilih Obon dan komplotannya. Jika karena keberuntungan Obon Tabroni dan komplotannya terpilih sebagai Pejabat, pada dasarnya akan ada delegasi kerja*

*yang dapat mempengaruhi strategi publik sehingga masuknya serikat dagang ke dalam bantuan pemerintah dari individu-individu mereka akan lebih mudah diakui di pemerintahan. Jadi ini sangat mengerikan, para buruh tidak benar-benar memahami hal ini."*<sup>65</sup>

Mengingat konsekuensi pertemuan peneliti dengan Obon Tabroni dan Rumainur selaku alumni peraturan kerja dan akademisi. Ia menilai perpecahan suara buruh di Pemerintahan Bekasi disebabkan oleh citra diri masing-masing pimpinan organisasi buruh. Karena di Rezim Bekasi sendiri, tidak semua spesialis tergabung dalam Konfederasi yang dibuntuti oleh FSPMI. Terdapat sekitar 14 konfederasi, 112 liga, dan sejumlah besar serikat pekerja tingkat organisasi, yang masing-masing memiliki sistem kepercayaan alternatif.



---

<sup>64</sup> Sastroatmodjo Sudjono, *Profil Budaya Politik*, (Semarang: IKIP 1995), Dalam bukunya Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal, 186.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Prof. Rumainur, S.H., M.H., Ph.D. (Guru Besar Ilmu Hukum S2 UNAS), Menara Universitas Nasional, 2 Januari 2024.

*“Kenyataan yang ada di lapangan, tidak semua buruh di Rezim Bekasi merupakan anggota KSPI atau FSPMI. Banyak juga yang berasal dari konfederasi SPSI dan lain-lain, sedangkan kenyataan yang ada di lapangan adalah SPSI dan FSPMI tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, bisa dikatakan Kabupaten Bekasi merupakan pilihan populer bagi para buruh atau serikat buruh, namun soliditasnya masih menjadi perdebatan. Para pionir, jadi mereka tidak memutuskan untuk menganggap saya sebagai pesaing resmi gratis. Karena ketua asosiasi dapat mempengaruhi individu dari asosiasi.”<sup>66</sup>*

Terpecahnya suara asosiasi membuat kaum buruh terlihat kurang kuat. Hal ini melemahkan suara buruh, melemahkan pendekatan mereka terhadap politik berbasis demokrasi, menempatkan mereka pada posisi lemah, dan menghalangi mereka memanfaatkan ruang politik yang sudah ada. Maka dalam keputusan kewilayahan tahun 2017 terlihat kekurangan dari lemahnya kekuatan buruh dan inilah yang menjadi salah satu penyebab suara para ahli tidak bisa memenangkan Obon dan komplotannya.

Kedua, Obon Tabroni yang menjabat Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) pada saat itu melontarkan pernyataan terkait hal tersebut. Ia menyatakan, pembagian suara dari serikat pekerja menjadi salah satu variabel yang membuat Obon Tabroni kalah dalam pengambilan keputusan provinsi tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa buruh pada Pilkada 2017 mempunyai afiliasi tersendiri yang tidak dapat dikontrol atau ditentang oleh siapa pun. Beberapa aspek pendekatan psikologis pendidikan mempengaruhi sikap politik sebagian buruh pada Pilkada 2017.

---

<sup>66</sup> Wawancara Dengan Obon Tabroni (Calon Bupati Independen), Kabupaten Bekasi , 08 Januari 2024.

Sebagai ciri sistem mental warga negara. Keadaan mental yang disebut dengan investasi adalah keadaan dimana seseorang merasa berhubungan dan berkewajiban terhadap suatu pihak atau perkumpulan tertentu. Dalam perilaku partisan, warga negara akan lebih sering memilih mendukung pertemuan atau pertemuan di mana mereka mempunyai tempat, karena mereka akan sering mengambil bagian dalam navigasi.<sup>67</sup>

*“Salah satu alasan mengapa suara buruh terpecah adalah konsekuensi dari aktivisme buruh yang menjadi aktivis partai. Aktivis buruh dan aktivis partai menyoroti fakta bahwa banyak anggota serikat pekerja harus memilih Obon, namun karena mereka juga anggota partai, mereka juga perlu menjamin bahwa para pemilihnya akan tetap terlindungi dari partai yang mereka ikuti. Seperti yang ditunjukkan olehnya, para ahli benar-benar menganggap bahwa standar partai lebih penting daripada pelajaran dari asosiasi pekerja itu sendiri.”<sup>68</sup>*

Dalam strategi psikologisnya sendiri, pendekatan tindakan mayoritas pemilih dapat dikenali melalui dua pemikiran. Yaitu: Pertama, perasaan menilai diri sendiri sebagai variabel penting atau tidak dalam kerangka pemikiran terhadap permasalahan yang dipengaruhi oleh kebijakan sehari-hari adalah konsep kontribusi politik. Kedua, identifikasi partai, atau perasaan kedekatan dan akuntabilitas terhadap pihak atau kelompok tertentu.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Saiful Mujani, William Liddle dan Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat: Perilaku Pemilih Dalam Pemilu Indonesia*, (Bandung: Mizan Publika, 2008) hal.24.

<sup>68</sup> Wawancara Dengan Obon Tabroni (Calon Bupati Independen), Kabupaten Bekasi , 08 Januari 2024.

<sup>69</sup> Saiful Mujani, William Liddle dan Kuskridho Ambardi *Kuasa Rakyat: Perilaku Pemilih Dalam Pemilu Indonesia*, (Bandung: Mizan Publika, 2008) Hal. 24.

Misalnya saja di wilayah Tambun Selatan sendiri yang partai PKSnya berbasis pada serikat FSPMI, tidak menutup kemungkinan para pekerja di Tambun Selatan bisa menjadi anggota PKS. PKS menjadi partai yang mengusung Sadudidan Ahmad Dhani. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para spesialis pada umumnya akan memilih partainya daripada serikat pekerjaanya. Faktor psikologis dan sosial menjadi penyebabnya.

Selain itu, Obon Tabroni juga menyampaikan, sejujurnya ketiadaan tenaga buruh seharusnya terlihat dari berbagai KTP, karena pedoman yang ditetapkan KPU untuk penawaran sebagai pesaing bebas harusnya memiliki sekitar 6,5% dari keseluruhan KTP. jumlah pemilih absolut.<sup>70</sup>

*“Hanya sekitar 30% pemilih yang diberikan oleh buruh yang mempunyai hak pilih pada pilkada, terwakili oleh KTP yang dikumpulkan dari buruh itu sendiri.” Ini jelas merupakan tanda lemahnya ketabahan buruh. Meski secara teoritis suara serikat buruh tidak akan hilang, namun diskusi menunjukkan bahwa serikat buruh yang mendukung Obon menargetkan 400 ribu suara untuk pasangan Obon dari suara buruh saja. Namun, Obon kehilangan suaranya di posisi ketiga karena kurangnya tekad para buruh. Kekurangan ini menjadi kendala bagi serikat pekerja di Indonesia, khususnya di Pemerintahan Bekasi.”<sup>71</sup>*

Rumainur, selaku pakar hukum ketenagakerjaan, mengatakan jika saja serikat-serikat buruh di Pemerintahan Bekasi bisa menciptakan peningkatan partisipasi dan semangat demi kesuksesan bersama, maka rasanya tak terpikirkan Obon Tabroni akan kalah dalam pemilu lokal 2017. balapan. Karena berdasarkan pemahaman yang baru-baru ini, perolehan suara dari para buruh yang telah memberikan hak suara pada pemilu teritorial tahun 2017 bisa dibilang sangat tinggi.

<sup>70</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, Bupati menjadi Undang-Undang pada Pasal 41 ayat 2c.

<sup>71</sup> Wawancara Dengan Obon Tabroni (Calon Bupati Independen), Kabupaten Bekasi , 08 Januari 2024.



*“Dengan asumsi kemarin solidaritas para pakar kuat dan bersatu, saya yakin serikat dagang punya opsi untuk memenangkan pencalonan Obon Tabroni dan cawapresnya menjadi pejabat atau kepala teritorial pada pemilu provinsi sebelumnya. Meski demikian, apa yang menjadi ciri ketangguhan buruh bisa dibidang merupakan suatu hal yang mahal atau menyusahkan serikat buruh, karena di Rezim Bekasi saat ini terdapat sekitar 14 konfederasi, 112 organisasi, dan banyak sekali serikat buruh tingkat organisasi, yang kesemuanya mempunyai citra diri yang tinggi, akhirnya tidak bisa dipadukan dan tidak bisa memenangkan calon yang merupakan delegasi buruh.”<sup>72</sup>*

Ketiga, adanya variabel persilangan dari FSPMI itu sendiri. Hal itu diungkapkan Obon kepada penciptanya saat pertemuan. Menurut Obon, sejumlah anggota sudah lolos proses pemungutan suara. Hal ini disebabkan adanya permasalahan dengan pasangan calon lawan yang mengakibatkan hilangnya suara antara 2% hingga 3% untuk FSPMI. Berikutnya adalah kutipan dari pernyataan singkat Obon.

*“Itu ada, asalkan tidak ada secara transparan, yang disebut sekutu terpancing oleh sesuatu yang dibutuhkan individu. Karena mereka melihat saya, banyak tim yang berpartisipasi kemarin. Sehubungan dengan yang lain, mereka memiliki harapan untuk membombardir suara mereka dan saya juga tahu identitasnya apa. Kalau saya tidak keberatan dia merubah suaranya, berarti dia tidak berpikiran sama dan telah merubah visi dan misinya.”<sup>73</sup>*

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Prof. Romainur, S.H., M.H., Ph.D. (Guru Besar Ilmu Hukum S2 UNAS), Menara Universitas Nasional, 2 Januari 2024.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Obon Tabroni (Calon Bupati Independen), Kabupaten Bekasi 08 Januari 2024.

Berdasarkan pernyataan Obon Tabroni di atas, kita dapat melihat adanya pendekatan Objective Decision atau keputusan yang masuk akal terhadap para spesialis. Keputusan berkepala dingin adalah keputusan dengan menghitung keuntungan yang paling ekstrim dengan menimbulkan biaya yang paling sedikit. Metodologi model ini berfokus pada elemen moneter politik dari sudut pandang individu dan agregat. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih yang rasional akan memilih calon yang dianggap menjanjikan keuntungan bagi dirinya dan keluarganya.<sup>74</sup>

Mereka tidak tertarik pada konsep politik atau kandidat partai. Tidak ada bedanya terlepas dari apakah Obon merupakan delegasi kerja, dari metodologi normal ini, para pemilih hanya melihat keuntungan terbaik yang bisa mereka peroleh dari kompetitor atau partai yang mereka pilih. Alhasil, faktor ini mempunyai dampak yang signifikan. Karena hal ini tidak hanya menyebabkan kurangnya keputusan yang menguntungkan pasangan Obon dan memindahkan suara pesaing bebas ke pasangan pendatang baru lainnya. Namun terlihat pula bahwa suara buruh sendiri terisolir dan tidak bisa dibilang kuat, sehingga suara para ahli tidak bisa memenangkan pasangan Obon Tabroni yang merupakan utusan buruh di Pemerintahan Bekasi.

---

<sup>74</sup> Saiful Mujani, William Liddle dan Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat: Perilaku Pemilih Dalam Pemilu Indonesia*, (Bandung: Mizan Publika, 2008) hal.24.

### 5.1.2 Pengalaman Politik yang Masih Minim

Rekrutmen politik masih kurang dipahami di Kabupaten Bekasi, dimana para pekerja dan masyarakat kelas bawah kurang memiliki pendidikan politik. Pelatihan politik masih sangat luas sifatnya, misalnya klarifikasi proses pengambilan keputusan politik sesuai rencana mertua dan undang-undang tidak resmi. Namun, baik kelas pekerja maupun masyarakat kelas bawah belum sadar akan pentingnya pemilu daerah. Menurut Obon Tabroni selaku pengurus luas FSPMI saat itu, pesaing dan pengurus tahun 2017, berikut penuturannya:

*“Intinya buruh tidak punya banyak kesempatan untuk berkonsentrasi pada urusan pemerintahan karena pekerjaan buruh disibukkan dari pagi hingga malam. Jadi memahami substansi partisipasi politik akan lebih merepotkan. Pada Pilkada 2017, kita bisa mengkaji bagaimana pemilih Bisa dibidang sebagian besar hidup buruh di Rezim Bekasi dihabiskan di pabrik, buruh berangkat dari pagi sampai malam, dengan asumsi juga para spesialis mendapat long move atau extra time mereka bisa pulang ke rumah sampai Selain itu, para pekerja, khususnya pekerja kontrak, lebih mementingkan bagaimana bekerja sekeras mungkin untuk mendapatkan perpanjangan kontrak dari majikannya.”<sup>75</sup> Hari-hari yang biasa dilakukan sebagian besar pekerja adalah berangkat kerja, pulang istirahat, lalu pulang kerja. kembali bekerja keesokan harinya, dan seterusnya. Karena sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk bekerja di pabrik dan dengan alasan bahwa mereka kurang memahami pentingnya isu-isu legislatif, maka perhatian mereka terhadap dukungan politik sangatlah rendah dan mereka umumnya tidak memiliki emosi.”*

Menurut Ramlan Surbakti, ada dua faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepentingan politik seseorang. Pertama dan terpenting, kesadaran politik terhadap kewajiban dan hak pemerintah atau sistem politik terhadap warga negara. Misalnya, hak istimewa politik, kebebasan moneter, kebebasan jaminan, komitmen finansial, dan komitmen sosial. Kedua, kita akan membahas tentang bagaimana mengevaluasi dan mengapresiasi kebijakan pemerintah dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan.<sup>76</sup> Faktor-faktor lain, seperti afiliasi politik orang tua, pengalaman

organisasi, dan status sosial dan ekonomi, mempengaruhi tingkat kedua faktor ini. Status sosial mengacu pada kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan kekayaan, yang dapat diukur dari pendapatan, pengeluaran, atau kepemilikan barang berharga. Seseorang yang mempunyai kedudukan sosial dan status keuangan yang tinggi mempunyai informasi politik, namun mereka juga mempunyai kepentingan dan kepentingan politik.<sup>77</sup>

Namun hal itu tidak terlihat pada pencalonan Obon Tabroni dan komplotannya. Informasi keterlibatan Obon Tabroni diperoleh dari sejumlah pekerja di Kabupaten Bekasi melalui jalur informal dari teman, keluarga, atau serikat pekerja pabrik. Ketiadaan pemahaman politik di kalangan spesialis membuat kaum buruh terlihat lemah dan dirugikan dalam posisi politik yang berdasarkan popularitas. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bagi buruh hal yang utama adalah bekerja dan menghasilkan uang untuk membantu keluarganya.



---

<sup>75</sup> Wawancara Obon Tabroni (Calon Bupati Independen), Kabupaten Bekasi , 08 Januari 2024.

<sup>76</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), hal, 184.

<sup>77</sup> *Ibid*, hal 18.

Hal ini seperti konsep perilaku politik, secara humanis yang berdampak pada seseorang yang menaruh perhatian pada ras adalah dengan adanya suatu tugas, karena kebanyakan orang yang tidak mempunyai pekerjaan umumnya akan lebih fokus pada bagaimana cara berperilakunya. untuk mencari pekerjaan dibandingkan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.<sup>78</sup> Dalam wawancara penulis, Obon juga menyatakan bahwa para pekerja di Kabupaten Bekasi kurang memiliki pengalaman politik. Hal itulah yang diungkapkan obon:

*“Buruh sebenarnya masih belum positif dari segi filosofi, masih belum tepat di zaman Presiden Soeharto. Politik telah mengusir buruh karena kalau terjun ke dunia politik, buruh akan menjadi seperti PKI, komunis dan lain sebagainya. Faktanya, jika para buruh bersatu, mereka bisa berubah menjadi kekuatan politik yang luar biasa besar dan kokoh.”<sup>79</sup>*

Di Indonesia, khususnya di Rezim Bekasi, banyak dokter dengan jumlah penduduk yang sangat besar justru tidak memiliki bidang kekuatan untuk memiliki wawasan, khususnya bagaimana memahami keterkaitan persoalan pemerintahan dengan kepentingan dan nasib hidup buruh itu sendiri. Sebagaimana dipahami di atas, cara berperilaku politik dari banyak pemilih buruh masih bergantung pada kecenderungan mereka sebagai buruh, namun lebih disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti faktor humanistik, mental dan obyektif dalam pengambilan keputusan.

---

<sup>78</sup>Saiful Mujani, William Liddle Dan Kuskritho Ambardi, *Kuasa Rakyat: Perilaku Pemilih Dalam Pemilu Indonesia*,(Bandung: Mizan Publika, 2008) hal.6.

<sup>79</sup>Wawancara dengan Obon Tabroni (Calon Bupati Independen), Kabupaten Bekasi , 08 Januari 2024.

Jika beruntung para pekerja memahami bahwa dasar pengkhianatan kerja di Indonesia terdapat dalam peraturan ketenagakerjaan, maka masuk akal jika para pekerja akan berjuang dengan sungguh-sungguh demi kemenangan agen mereka di pemilu lokal tahun 2017. keputusan sehingga delegasi mereka benar-benar ingin mengubah atau mungkin membantu para spesialis dalam mengubah dan mempengaruhi pengaturan publik. . Meskipun banyak pekerja di Kabupaten Bekasi yang melek politik, namun tidak semua pekerja memiliki pendidikan politik yang minim, dapat disimpulkan bahwa **finis** ketiga pasangan Obon pada Pilkada 2017 disebabkan oleh rendahnya pendidikan para pekerja.

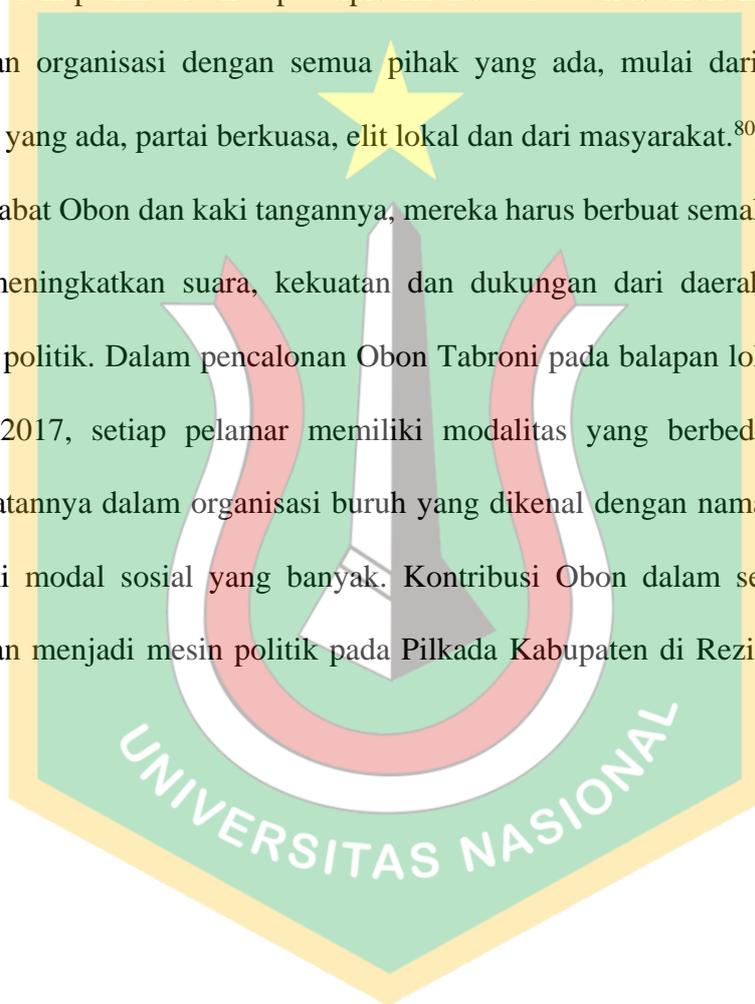
## **5.2 Faktor dan Variabel yang Menyebabkan Kekalahan Obon Tabroni**

Dengan total 207.940 suara, Obon Tabroni dinyatakan kalah dan menempati posisi ketiga dalam penghitungan suara pada 15 Februari. Hal ini menimbulkan sedikit keterkaitan, terutama di kalangan pakar aktual dan jurnalis. Berdasarkan penelitian penulis, kekalahan Obon Tabroni dan rekannya disebabkan oleh beberapa faktor utama. Faktor utama penyebab jatuhnya Obon adalah:

### **5.2.1 Popularitas Obon Tabroni yang Minim di Kalangan Masyarakat Umum**

Kemajuan Obon Tabroni yang diusung oleh serikat dagang FSPMI dengan jalur otonom, menyatakan bahwa dalam keputusan provinsi tahun 2017, buruh menjadikan dirinya sebagai pejuang politik dalam perlombaan teritorial Rezim Bekasi tahun 2017. Pejuang politik adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam siklus politik. Di zaman sekarang, seseorang untuk menjadi bupati tidak hanya memerlukan dukungan dan suara rakyat, tetapi juga harus populer di tempat yang dicalonkannya agar masyarakat mengetahui siapa dirinya.

Sebagai aturan umum, untuk menjadi calon kepala daerah, diperlukan modalitas yang memadai, dan modalitas-modalitas tersebut telah disiapkan. Akan menjunjung tinggi pesaing yang lebih sederhana untuk menjadi pendatang baru lokal. Saat pemilu, modal ini juga sangat penting dalam membangun hubungan politik dan memperluas dukungan. Sistem demokrasi dan prosedur pencalonan politik dalam pemilu tidak dapat dipisahkan secara teoritis. Koneksi ini mencakup hubungan organisasi dengan semua pihak yang ada, mulai dari lembaga adat, yayasan yang ada, partai berkuasa, elit lokal dan dari masyarakat.<sup>80</sup> Sebisa mungkin bagi Pejabat Obon dan kaki tangannya, mereka harus berbuat semaksimal mungkin untuk meningkatkan suara, kekuatan dan dukungan dari daerah setempat dan asosiasi politik. Dalam pencalonan Obon Tabroni pada balapan lokal di Peraturan Bekasi 2017, setiap pelamar memiliki modalitas yang berbeda-beda. Karena keterlibatannya dalam organisasi buruh yang dikenal dengan nama FSPMI, Obon memiliki modal sosial yang banyak. Kontribusi Obon dalam serikat buruh ini kemudian menjadi mesin politik pada Pilkada Kabupaten di Rezim Bekasi tahun 2017.



---

<sup>80</sup> Subkhan, Tomaito Subkhan, *Watak Politik Aristokrat di Pemilu*. Yogyakarta: PLOD-UGM. 2011, hal, 11.

Mengingat hasil pertemuan pencipta dengan narasumber, khususnya Obon Tabroni sendiri, maka Obon merupakan pemohon resmi utama sepanjang keberadaan ras lokal di Kabupaten Bekasi untuk dimanfaatkan oleh para buruh. Intinya, pekerja dan serikat buruh lebih mengenal Obon. Namun karena popularitas pasangan calon tersebut sangat dibutuhkan dalam suatu pemilu, ia terpaksa tersingkir sebagai calon bupati Obon di mata masyarakat Bekasi.

*“Pentingnya prevalensi pasangan pendatang baru dapat menyebarkan berita tentang pasangan pesaing dengan lebih baik kepada masyarakat pada umumnya. Apabila masyarakat pada umumnya sudah memberikan koordinator pelamar dengan baik, maka bisa dipastikan sebagian kepercayaan masyarakat akan tersirat pada diri calon pelamar itu sendiri. Selain itu, rekam jejak pasangan calon dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap calon itu sendiri. Dengan asumsi pasangan calon yang muncul dalam keputusan daerah adalah selebritis atau orang-orang terkemuka di mata masyarakat pada umumnya, maka akan muncul keinginan masyarakat untuk memenangkan pasangan pesaing tersebut.”<sup>81</sup>*

*“Berbeda dengan mereka yang mengadakan partai, pihak independen mungkin diharuskan untuk membangun jaringan mereka sendiri. Pada dasarnya sebuah partai di setiap kota harus memiliki unit, tapi partai saya tidak. Praktisnya 90% dari individu yang memilih saya adalah buruh, ada yang tanya ke saya. Sampai Obon punya pertanyaan? Apakah Obon layak jadi bupati? Bisakah Anda mewujudkannya? Mereka lebih akrab dengan nama-nama seperti Sadudin atau Neneng, yang kemudian menjadi Bupati.”<sup>82</sup>*

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Obon Tabroni (Calon Bupati Independen), Kabupaten Bekasi , 08 Januari 2024

<sup>82</sup> Wawancara dengan Obon Tabroni (Calon Bupati Independen), Kabupaten Bekasi , 08 Januari 2024

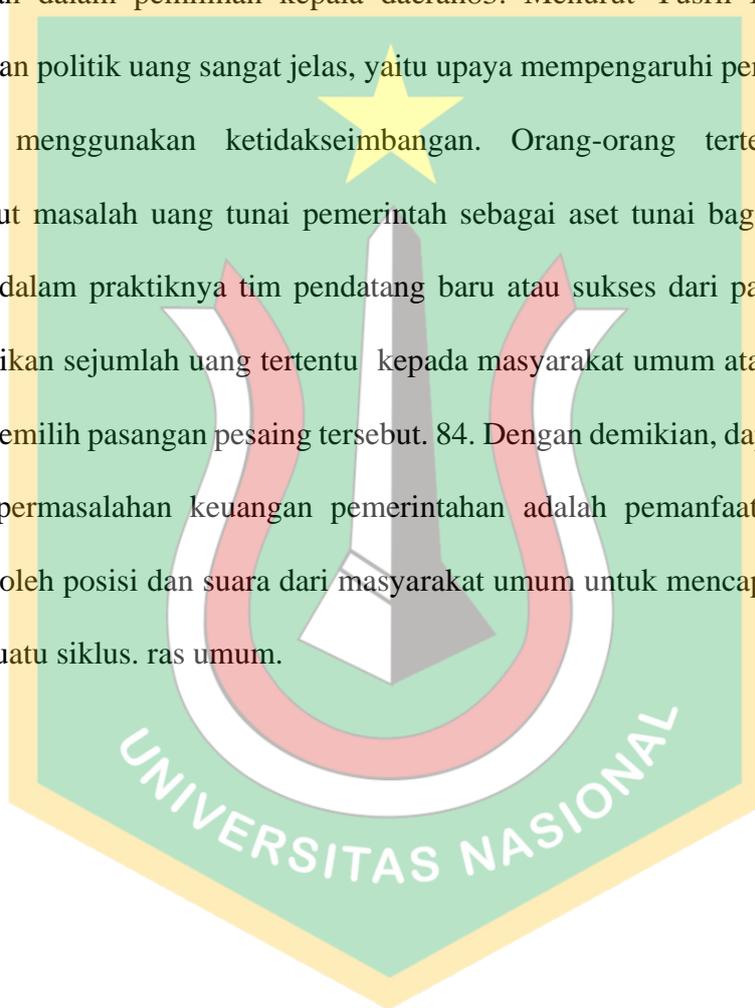
Dari pertemuan tersebut terlihat bahwa Obon Tabroni, komplotannya memang membutuhkan keunggulan di kalangan buruh dan masyarakat setempat pada Pilkada tingkat provinsi tahun 2017. Dalam sejarah Kabupaten Bekasi, Obon Tabroni merupakan orang pertama yang naik ke atas kelompok atau perwakilan buruh. Namun salah satu faktor penyebab kekalahan pasangan Obon Tabroni pada Pilkada 2017 adalah minimnya pengakuan yang mereka terima di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan faktor sosiologi, warga Kabupaten Bekasi lebih cenderung mencari calon pasangan. Hal ini karena pemilih lebih mengenal pengalaman dan hasil pelaksanaannya, misalnya Sadudin sebagai Pejabat sebelumnya pada periode 2007-2012 dan Neneng yang merupakan Pejabat sebelumnya. Jika dibandingkan dengan perolehan suara dua paslon lawan, hal inilah yang menyebabkan Obon dan rekannya finis di peringkat ketiga. Hal ini terlihat dari banyaknya pemilih yang memilih Obon yang sebagian besar adalah buruh, khususnya serikat buruh FSPMI.

### **5.2.2 Money Politic di Lingkungan Masyarakat dan Buruh di Kabupaten Bekasi**

Problematika keuangan pemerintah dalam menyelenggarakan perlombaan harus dilihat sebagai masalah kecil. Hampir semua orang menyadari bahwa permasalahan perundang-undangan tunai sering terjadi dalam setiap keputusan politik, namun keberadaannya sulit untuk diungkap dan membutuhkan kerja keras untuk membatasi isu-isu pemerintah tunai dalam setiap keputusan politik di Indonesia. Permasalahan permasalahan uang tunai saat ini bukanlah hal yang luar biasa di Indonesia, bahkan keanehan ini sering terjadi di Indonesia dengan derajat yang berbeda-beda.

Dalam konteks perlombaan politik secara umum, isu legislatif tunai adalah sejenis pemberian uang tunai kepada para pemilih agar mereka tidak menggunakan haknya untuk memilih pendatang baru atau pesaing dalam pengambilan keputusan politik secara keseluruhan. Politik uang dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kepentingan, dalam hal ini keinginan untuk memenangkan suara atau dukungan dalam pemilihan kepala daerah<sup>83</sup>. Menurut Yusril Ihza Mahendra, pengertian politik uang sangat jelas, yaitu upaya mempengaruhi perilaku seseorang dengan menggunakan ketidakseimbangan. Orang-orang tertentu umumnya menyebut masalah uang tunai pemerintah sebagai aset tunai bagi warga negara. Karena dalam praktiknya tim pendatang baru atau sukses dari pasangan pesaing memberikan sejumlah uang tertentu kepada masyarakat umum atau warga negara untuk memilih pasangan pesaing tersebut. <sup>84</sup>. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa permasalahan keuangan pemerintahan adalah pemanfaatan uang untuk memperoleh posisi dan suara dari masyarakat umum untuk mencapai kemenangan dalam suatu siklus. ras umum.



---

<sup>83</sup>Komisi Pemilihan Umum, *Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum 2014 (Studi atas kehadiran dan ketidakhadiran di TPS, Perilaku Pemilih, Politik Uang, Melek Politik, dan Kesukarelaan Warga)*, 2014, hal, 138.

<sup>84</sup>Indra Ismawan, *Money Politics- Pengaruh Uang dalam Pemilu*, (1999- Media Pressindo), hal. 35.

Secara holistik keputusan, permasalahan keuangan pemerintahan sangat terbatas karena bertentangan dengan Peraturan No. Pasal 73 ayat 3 UU Pemilu 1999 menyebutkan, siapa pun yang memberikan uang atau suap dalam pemilu, diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun. Baik penerima suap maupun penerima suap menerima hukuman ini.<sup>85</sup> Pada pemilihan Bupati Kabupaten Bekasi tahun 2017, sejumlah isu terkait politik uang juga sempat disinggung. Banyaknya persaingan antar pasangan calon sehingga berujung pada politik uang dan pemberian barang-barang kebutuhan dan lain-lain dari salah satu pasangan calon untuk mendapatkan suaranya. Namun yang sangat memprihatinkan adalah masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya politik uang di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan sumber Yanto, Ketua Bidang Politik dan Aksi FSPMI menyatakan bahwa politik uang dan pembagian sembako pada pemilu di Kabupaten Bekasi masih sangat kuat dan sulit dihilangkan. menandakan warga Kabupaten Bekasi cenderung pragmatis pada pilkada kali ini. Pragmatik mengacu pada kesediaan seseorang untuk memilih kepentingannya sendiri pada saat hal tersebut masuk akal bagi dirinya dan keluarganya.

---

<sup>85</sup> UU No. 3 Tahun 1999 Pasal 73 Ayat 3 Tentang Pemilihan Umum.

*“Memang betul oknum-oknum Pemerintahan Bekasi masih sangat terpengaruh dengan persoalan uang tunai pemerintahan dan saya tidak melibatkan uang tunai dalam perlombaan politik teritorial ini. Metodologi yang biasa dalam masalah perundang-undangan uang tunai di sini juga bergeser, ada masyarakat yang memberi dengan cara yang tidak mencolok. Misalnya pemberian jabatan publik, pengedaran sembako, pembagian kaos, bahkan ada oknum yang terang-terangan memberikan uang kepada pemilih karena hanya untuk uang tunai sembako. mereka harus dibebaskan dari uang tunai. Mereka tetap beranggapan bahwa hasil pilkada yang ada di tangan kita ini akan menentukan diterima atau tidaknya kita menerima dana dan kebutuhan pokok lainnya. Begitulah yang dirasakan warga Kabupaten Bekasi. menjadi.”<sup>86</sup>*

Berdasarkan temuan wawancara, para pekerja lebih memilih pasangan kandidat yang memberikan mereka uang atau kebutuhan pokok terbanyak sebagai imbalan atas hak pilih mereka. Bahkan ada pula yang terang-terangan memberikan uang tunai kepada pemilih dengan alasan sebagai pengganti uang makan, uang kerja, uang transportasi, dan uang tunjangan. Modus politik uang di negeri ini juga beragam. Meski ada yang memberi secara halus seperti penyediaan fasilitas umum, pembagian sembako, dan pembagian kaos, ada juga yang memberikan uang tunai kepada pemilih secara terang-terangan.

Data ini menunjukkan bahwa perilaku politik pekerja dan masyarakat semakin pragmatis. Warga negara akan memilih pelamar yang menguntungkan dirinya jika diyakini mampu memenuhi atau mendukung kecenderungannya (situasi). Hal ini menunjukkan bahwa pemilih akan memilih kandidat yang janji manfaatnya bagi dirinya dan keluarganya dianggap kredibel. Saiful Mujani,

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Obon Tabroni (Calon Bupati Independen), Kabupaten Bekasi , 08 Januari 2024

William Liddle dan Kuskridho Ambardi dalam bukunya menguraikan keputusan ini:

Pemilih yang rasional berupaya memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih akan memilih calon yang janji manfaatnya bagi dirinya dan keluarganya dianggap kredibel. Pemilih pada umumnya tidak tertarik dengan ide-ide politik atau calon dari partai, namun warga negara melihat keuntungan terbesar yang dapat mereka peroleh dari pesaing atau partai tersebut.<sup>87</sup>

Bagi orang-orang di Pemerintahan Bekasi, hal ini mempunyai alasan yang masuk akal, karena mereka jenuh dengan komitmen politik dari pertandingan yang akan datang, sehingga bagi mereka dorongan yang diberikan oleh para pelamar berupa uang, kebutuhan pokok dan lain-lain menjadi pilihan lain. dan keputusan obyektif bagi individu dan pekerja sendiri.

### 5.2.3 Konstituen yang Tidak Mencoblos (Golput)

Dalam keputusan politik umum Peraturan Daerah Bekasi tahun 2017, perilaku warga negara hanya mempunyai dua prospek, yaitu yang pertama dan utama, para pemilih mengambil bagian dan memutuskan mendukung salah satu pertandingan kompetitor yang ada dan terlebih lagi, warga negara tidak memanfaatkan kebebasan demokratisnya dalam pemilihan umum. perlombaan politik secara keseluruhan. Terlepas dari apakah warga negara memilih benar-benar mengandalkan dana untuk ikut serta dalam kegiatan politik, faktor mendasar yang menyebabkan para pemilih ikut serta dalam kegiatan politik adalah karena kepuasan finansial.

Berdasarkan informasi yang diambil pencipta, salah satu variabel kekalahan Obon Tabroni pada Pilkada Tingkat Provinsi Kabupaten Bekasi tahun 2017 adalah banyaknya pemilih yang tidak menggunakan haknya untuk memilih. Hal ini terlihat dari konsekuensi perhitungan KPUD Peraturan Kota Bekasi yang menyatakan bahwa sekitar 39,1% masyarakat Rezim Bekasi tidak melaksanakan haknya untuk memilih (Golput).<sup>88</sup>

Meski KPU sudah menyampaikan permintaan dan upaya kepada masyarakat pada umumnya, namun keputusan untuk mencoblos atau tidak tetap berada di tangan masyarakat sebenarnya. Partisipasi politik warga Kabupaten Bekasi tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat sosialisasinya, tetapi juga berbagai faktor lain yang turut menyebabkan sikap apatis pemilih.

Dalam bukunya, Ramlan Surbakti mengidentifikasi tiga jenis partisipasi masyarakat. Untuk memulainya, peserta aktif akan fokus pada proses keluaran dan masukan politik. Kedua, investasi yang tidak terlibat adalah pergerakan yang terletak pada siklus hasil. Ketiga, jika seseorang menyatakan bahwa kerangka politik saat ini telah melenceng dari apa yang diperjuangkannya, maka pada saat itu pertemuan ini akan menjadi tanpa emosi.<sup>89</sup> Mengingat konsekuensi pertemuan pencipta dengan narasumber, khususnya Obon Tabroni, ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya dukungan politik masyarakat sekitar dan buruh. di Rezim Bekasi yang membuat masyarakat dan buruh menjadi pasif. Subjek wawancara menyatakan:

---

<sup>87</sup> Saiful Mujani, William Liddle dan Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat: Perilaku Pemilih Dalam Pemilu Indonesia*, (Bandung: Mizan Publika, 2008) hal.24.

<sup>88</sup> <https://www.pilkada2017.kpukabupatenbekasi.go.id>, 10 Desember Juli 2023.

<sup>89</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Grasindo, 1992), hal, 182.



Kehadiran aplikasi terisolasi membuat penghuninya bertanya-tanya apakah akan datang ke TPS atau tidak. Misalnya, pemilih enggan mencoblos ketika undangan keluarga dikirimkan kepada pasangan suami istri yang terdaftar di TPS 9 dan 11. Kedua, pemilih lebih memilih tidak memilih karena menganggap pilkada mendatang tidak akan membantu mereka.

“Yang pertama adalah uang tunai, yang kedua adalah pengorganisasian para lurah di kelompok masyarakat Pemerintahan Bekasi, apa tugas dari lurah, tugas dari lurah ini banyak melakukan mediasi lokal untuk membantu antek-antek lain yang diharapkan, saya bisa cuma ada satu lurah yang mendukung saya, Lurah Wanajaya, dari segi manajerial memang kacau balau, banyak sekali ajakan-ajakan yang memberikan suara untuk memihak kami. Saya tidak dapat, apalagi di kota saya yang menjadi basis saya, tidak mendapat jumlah yang banyak. Soalnya warga harus menggunakan E-KTP untuk mencoblos. Rata-rata saya tidak punya E-KTP, tapi pada akhirnya diperbolehkan. Misalnya secara administratif, pasangan suami istri dari TPS berbeda tidak punya TPS yang sama. Ini sama saja dengan menyingkirkan pemilih, yang logikanya memang mereka inginkan. Bapak dan pasangannya diisolasi tanpa dipungut. Organisasinya bangkrut. Selain itu, kita bisa mengerahkan Sadudin, Ketua Departemen saat ini, dan mantan Bupati, serta pasangan lain yang mendapat dukungan dari Anggota DPRD DPR RI. dewan, di mana kami memiliki jaringan politik yang kuat. lebih baik percaya saja, itu saja yang ada.”<sup>90</sup>

Seperti yang diuraikan oleh Milbarth, orang menghindari masalah administratif

karena beberapa faktor. pertama-tama, karena kepedulian terhadap hasil gerakan politik. kedua, adanya penilaian bahwa spekulasi politik hanyalah sebuah pemborosan. Dan yang ketiga adalah agregasi yang tidak ada hasil dari bantuan mereka dalam partisipasi politik.<sup>91</sup> Konsekuensinya, ketidakpuasan masyarakat dan buruh, serta kerugian yang ditimbulkan pada perpecahan pemerintahan pada pilkada sebelumnya, tidak lepas dari munculnya fenomena golput pada Pilkada Kabupaten Bekasi tahun 2017. di setiap desa dan TPS menyebabkan pasangan Obon Tabroni kehilangan banyak suara.

Selain itu, kekecewaan terhadap tidak adanya kemajuan besar dalam upaya pengembangan lebih lanjut bantuan pemerintah terhadap buruh juga menyebabkan kurangnya kepedulian masyarakat pada umumnya dan buruh. Jika tidak memilih siapa pun, pada akhirnya akan mengecewakan buruh dan masyarakat umum yang telah memberikan dukungannya kepada pasangan calon, partai politik, dan organisasi pendukungnya. sehingga calon dan pendukungnya tidak dapat lagi mempengaruhi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Obon Tabroni (Calon Bupati Independen), Kabupaten Bekasi , 08 Januari 2024.

<sup>91</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Grasindo, 1992), hal, 183